

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota
Semarang)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**TANTRIANI SUKMANINGRUM
NIM. C2C008137**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Tantriani Sukmaningrum

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008137

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten
dan Kota Semarang)**

Dosen Pembimbing : Puji Harto, S.E., Msi., Akt

Semarang, 14 Februari 2012

Dosen Pembimbing,



(Puji Harto, S.E., Msi., Akt)
NIP. 19750527 200012 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Tantriani Sukmaningrum

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008137

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten
dan Kota Semarang)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 Februari 2012

Tim Penguji

1. Puji Harto, S.E, M.Si, Akt
2. Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si, Akt
3. Drs. Dul Mu'id, M.Si, Akt



(
)
(
)
(
)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Tantriani S., menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang) “** adalah hasil tulisan tangan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasa yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Februari 2012

Yang membuat pernyataan,

(Tantriani Sukmaningrum)

NIM : C2C008137

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Many failures in this life because people don't realize how close they
were to success when they gave up (Thomas Alva Edison)

Agama tanpa ilmu akan pincang dan ilmu tanpa agama akan buta
(Einstein)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Mama dan Bapak tercinta,

Bu Nung

kakak dan adik tersayang, serta

sahabat dan "keluarga" saya

Terima kasih untuk doa, motivasi, dan kesabaran

Kalian yang terbaik yang Tuhan hadirkan

ABSTRACT

This study aims to determine factors influencing local government financial statement quality. Based on PP No. 24 year 2005, state and local government financial statement quality have to meet the qualitative characteristic. Factors examined include quality of human resources, internal control systems, and external factors.

Data collection is done by giving as many as 150 copies of the questionnaire, which was distributed to respondents who are staff on the unit of Work Of The Office of financial management and assets (DPKAD) of The City of Semarang and Office of the revenue and the Financial Management Area (DPPKD) of Semarang Regency. The Data obtained are then analyzed using SPSS 17.00.

Test results showed that the internal control systems have significant positive impact on information quality of local government financial statement, while competency of human resources do not affect. Competency of human resources are not significant due to the lack of quality and quantity on human resources itself. External factors can not be used as a moderating relationship between the competence of human resources and the system of internal control to the quality of financial reporting information. External factors role as a independent variable and has no effect on the quality of financial reporting information. External factors are not affect due to the dynamics of the sector of Government not accommodated by the readiness of the human resources and not proactive toward public pressures.

Key Words : *local government financial statement quality, information value, quality of human resources, internal control system, external factors.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bersasar pada PP No. 24 tahun 2005, kualitas laporan pemerintah pusat dan daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif. Faktor-faktor yang diteliti antara lain kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal.

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 150 eksemplar, yang dibagikan kepada responden yang merupakan staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Derah Kabupaten Semarang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS 17.00.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Faktor eksternal berperan sebagai variabel bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik.

Kata Kunci : *laporan keuangan pemerintah daerah, nilai informasi, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, faktor eksternal.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)”**. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini memiliki keterbatasan. Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih, terutama kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kehidupan dengan semua limpahan rezeki dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya sebagai bentuk ibadah kepada-Nya.
2. Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Syafruddin, Msi., Akt selaku ketua jurusan akuntansi
4. Bapak Puji Harto , SE., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Warsito Kawedar, SE., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penulisan proposal dalam skripsi ini.
6. Ibu Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.e., M.Si., Akt selaku dosen wali.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
10. Seluruh pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
11. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Bapak Ir. Bambang Nugroho dan Mama Purwanti Andayani Rustanti, yang tiada henti berdoa, memotivasi, memberi semangat dan dukungan materi maupun immateri. Terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, pengharapan dan kepercayaan yang diberikan.
12. Bu Nung yang tiada henti membantu dengan usaha serta semangat yang luar biasa sehingga penulis tidak menyerah dititik yang tidak seharusnya.

13. Kakak dan adik terkasih (Ilham Rizqi Primanto dan Swastinitya Sukmaningrum) yang selalu berdoa, memberikan semangat, motivasi, serta nasihat dalam menyelesaikan penelitian ini.
14. Eyangti dan Eyangkung serta semua keluarga besar Ruslan dan Oedijono yang telah memberikan doa dan motivasi yang cukup besar untuk sebuah pembuktian diri.
15. Keluarga PR 39: Bapak dan Ibu Agus Djara, Ka Boo, Ka Chika, Ka Etoo, Ka Bino, Ka Risti, Ay Grace, Rere, Ade Ridha, Ade Hani, Bang Ian, yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang saat penulis merasa sendiri dalam menghadapi kesulitan. The great family
16. Keluarga Kanginan 63 yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
17. Sahabat Basecamp, teristimewa Hartanti Proborini dan Ajeng Rahardyani Hersariti, terima kasih untuk semua dukungan dan doa, kebersamaan, tawa dan tangis, serta persahabatan yang kita jalani lebih dari 15 tahun.
18. Sahabat terkasih KKM : Sabhrina Kushayandita, Pratika, Windi Gessy Annisa, Novan Permana, Catur Nugroho, Rizky Syahfandi terima kasih untuk dukungan, kebersamaan dan persahabatannya.
19. Teman satu bimbingan saya Siti Kurniati (pada awal KIPS) yang telah berlelah bersama mencari data, Amelinda Devina yang telah mengajarkan saya mengolah data penelitian, Rizky Aulia yang telah mensupport saya sampai proposal saya selesai.

20. Teman-teman KKN Desa Wanusobo 2011, terima kasih untuk support dan doanya.
21. Teman-teman akuntansi 2008 seluruhnya dan teman-teman KKN Kecamatan Kedung 2011, terima kasih untuk motivasi baik secara langsung maupun tidak.
22. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan tulisan ini ataupun bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 14 Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
2.4 Hipotesis.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	41

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	46
3.5 Metode Analisis	46
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	55
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	55
4.2 Gambaran Umum Responden.....	56
4.3 Statistika Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian.....	57
4.4 Analisis Uji Beda T-Test.....	60
4.4 Analisis Data Kuantitatif.....	63
4.5 Analisis Regresi.....	76
4.6 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.....	79
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Simpulan.....	85
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	86
5.3 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kelompok Temuan Akibat Ketidak Patuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2010.....	6
Tabel 1.2 Perkembangan Opini LKPD tahun 2004-2010.....	7
Tabel 1.3 Opini LKPD Tahun 2005-2010 Berdasar Tingkat Pemerintahan (Kabupaten dan Kota).....	8
Tabel 1.4 Data LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010.....	8
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	56
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	57
Tabel 4.3 Statistika Deskriptif Variabel Penelitian.....	57
Tabel 4.4 Hasil Uji Beda T-Test Group Statistics.....	60
Tabel 4.5 Hasil Independent Sample Test.....	62
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	66
Tabel 4.7 Hasil Uji validitas.....	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test.....	69
Tabel 4.9 Casewise Diagnostics.....	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test.....	70
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas.....	71
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolonieritas.....	72
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolonieritas.....	73
Tabel 4.14 Hasil Uji Glejser.....	75

Tabel 4.15 Koefisien Determinasi.....	76
Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik F.....	77
Tabel 4.17 hasil Uji Statistik T.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Financial Reporting Standatds-Setting Structure</i>	15
Gambar 2.2 <i>Internal Control Integrated Framework</i>	30
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	36
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Analisis Grafik.....	70
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas – Grafik Normal P-P Plot.....	70
Gambar 4.3 Scatterplot.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Surat Ijin Penelitian.....	91
Lampiran B Kuesioner Penelitian.....	95
Lampiran C Data Penelitian.....	103
Lampiran D Statistika Deskriptif.....	110
Lampiran E Analisis Uji Beda T-Test.....	111
Lampiran F Reliabilitas dan Validitas Data.....	114
Lampiran G Uji Asumsi Klasik.....	125
Lampiran H Analisis Regresi Berganda.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Selanjutnya Badjuri dan Trihapsari (2004) mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No.1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Huang *et al.* (1999) dalam Xu *et al.* (2003) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

a. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (*predictive value*), dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*). Dan agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat

waktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan (*timeliness*).

b. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila :

1. Dapat diuji kebenarannya (*verifiabel*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

2. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

3. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

Mengambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

c. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

d. Dapat dipahami

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 358 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2011 menemukan 3.397 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. BPK juga menemukan dan mencatat

ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 5.551 kasus yang meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan, pembayaran melebihi standar, dengan total kerugian sebanyak 5,28 triliun sebagaimana disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kelompok Temuan Akibat Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2010

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rupiah)	%
Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah	1.197	26,3	376.965,01	7,14
2	Potensi Kerugian Daerah	313	6,88	3.283.343,78	62,17
3	Kekurangan Penerimaan	857	18,83	478.101,00	9,05
4	Administrasi	1.774	38,98	-	-
5	Ketidakhematan/ pemborosan/ ketidakekonomisan	144	3,16	73.215,37	1,39
6	Ketidakefisienan	2	0,04	1.370,03	0,03
7	Ketidakefektifan	264	5,8	1.068.576,00	20,23

(sumber: www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2011)

BPK juga telah melakukan audit atas LKPD selama tujuh tahun, dari tahun 2004-2010. BPK memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana tersaji dalam tabel 1.2. Hasil pemeriksaan keuangan daerah semakin memburuk setiap tahun, hal ini didukung oleh data dari BPK yang menyatakan bahwa persentase LKPD dari tahun 2004-2007 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dan wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK semakin berkurang dan sebaliknya, opini tidak wajar (TW), bahkan tidak memberikan pendapat (TMP) meningkat drastis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 mulai

menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik, tetapi hal ini masih dinilai kurang bila dibandingkan dengan jumlah LKPD yang diaudit oleh BPK.

Tabel 1.2
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2004-2010

Tahun	OPINI								
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2004	21	7,32	249	86,76	10	3,48	7	2,44	287
2005	17	4,70	308	85,08	12	3,31	25	6,91	362
2006	3	0,65	326	70,41	28	6,05	106	22,89	463
2007	4	1	283	60	59	13	123	26	469
2008	13	3	323	67	31	6	118	24	485
2009	15	4	330	66	48	10	106	21	499
2010	32	9	271	76	12	3	43	12	358*

^{)} sampai dengan semester I 2011

(sumber: www.bpk.go.id)

Daftar opini LKPD berdasar tingkat pemerintahan (Kabupaten dan Kota) tersaji dalam tabel 1.3 yang sekaligus menunjukkan opini WTP baik dalam pemerintahan kabupaten maupun kota jumlahnya masih sangat sedikit. Tabel 1.4 menyajikan perkembangan LKPD Kabupaten dan/ atau Kota pada Provinsi Jawa Tengah, yang menunjukkan perkembangan opini WTP dari tahun 2005 hingga 2009 tidak mengalami peningkatan bahkan yang terjadi sebaliknya.

Tabel 1.3
Opini LKPD Tahun 2005-2010 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
(Kabupaten dan Kota)

Pemda	Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TW	TMP	JML	WTP	WDP	TW	TMP	JML
2005	12	213	10	20	257	2	66	2	3	73
	5%	83%	4%	8%	100%	3%	90%	3%	4%	100%
2006	2	236	21	85	344	1	66	3	16	86
	1%	68%	6%	25%	100%	1%	77%	3%	19%	100%
2007	1	201	45	103	350	2	61	11	12	86
	1%	57%	13%	29%	100%	2%	71%	13%	14%	100%
2008	6	235	26	96	363	7	64	4	14	89
	2%	65%	7%	26%	100%	8%	72%	4%	16%	100%
2009	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	15	200	10	35	260	11	51	2	6	70
	6%	77%	4%	13%	100%	16%	73%	3%	8%	100%
Rata-Rata	8	221	25	72	326	5	63	5	10	83
	2%	68%	8%	22%	100%	6%	76%	6%	12%	100%

(sumber: www.bpk.go.id)

Tabel 1.4
Data LKPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2010

Tahun	OPINI								
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2005	2	5,56	34	94,4	0	0	0	0	36
2006	0	0	35	97,2	1	2,78	0	0	36
2007	0	0	32	88,89	0	0	4	11,11	36
2008	0	0	34	94,4	0	0	2	5,56	36
2009	0	0	36	100	0	0	0	0	36
2010	2	0,05	33	91,67	0	0	1	2,78	36

(sumber: www.bpk.go.id)

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan, yaitu: Xu *et al.* (2003); Choirunisah (2008);

Indriasari dan Nahartyo (2008); Nugraha dan susanti (2010); Winidyaningrum dan Rahmawati (2010). Mengacu pada penelitian terdahulu, bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kualitas laporan keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah, penelitian ini menarik untuk meneliti kembali faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah faktor eksternal (EKS) memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah faktor eksternal organisasi (EKS) memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh faktor eksternal dalam hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh faktor eksternal dalam hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

Kegunaan penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Hasil penelitian untuk menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari pengaruh faktor kualitatif.
3. Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh SDM, SPI, dan faktor eksternal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I

Merupakan bagian pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II

Merupakan bagian tinjauan pustaka, berisi teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

- Bab III

Membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, metode penelitian, metode

pengambilan sampel, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengambilan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

- Bab IV

Merupakan bagian pembahasan, yang berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

- Bab V

Merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori kegunaan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*)

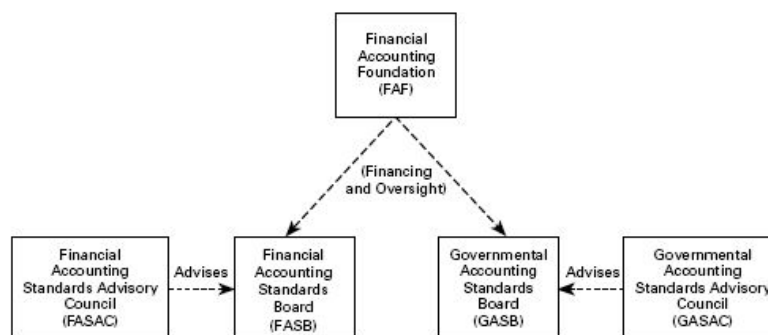
Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (*decision-usefulness theory*). Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (*decision usefulness*) adalah Chambers. Ia mengatakan sebagai berikut:

Oleh karenanya, akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan... Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, sistem seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan (dalam Belkoui, 2001).

Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat. Staubus (2003) dalam Kiswara (2011) menyatakan pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *a theory of accounting to investors*. Selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB. FAF membuat GASB pada tahun 1984 dalam hubungan “kakak-adik” dengan FASB.

GASB bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan FASB menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi lainnya termasuk non pemerintahan dan organisasi non profit (Freeman, 2008). Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 2.1
Financial Reporting Standards-Setting Structure



(Freeman, 2008)

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. *SFAC No. 2* tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). *FASB* menyatakan

bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan.

Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan *bias*, dan mewakili apa yang akan digambarkan. Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan. *FASB* menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi *investor*, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya.

Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictive-value*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*).

Di Indonesia sampai dengan saat ini, telah ada komite yang bekerja menyusun standar akuntansi pemerintahan di Indonesia yang dibentuk

berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 308/KMK/2002 yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), akan tetapi yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah dengan Peraturan Pemerintah. Berbeda dengan GASB yang memiliki otoritas tertinggi, pemerintah Indonesia mengenal hirarki PABU dan SAK sebagai acuan utama yang memiliki otoritas.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2005 mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam *SFAC No. 2*. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

2.1.2. Teori Stakeholder

Freeman (1984) dalam Mainardes *et al.* (2011) menjelaskan *Stakeholder theory*, bahwa organisasi harus peduli dengan kepentingan *stakeholders* ketika membuat keputusan strategis. Meskipun setiap peneliti mendefinisikan berbeda tentang *Stakeholder theory*, prinsipnya sama yaitu perusahaan atau organisasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi (Frederick *et al.*, 1992 dalam Mainardes *et al.*, 2011). Teori stakeholder umumnya merupakan teori bagi perusahaan sektor swasta. Akan tetapi pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat diterapkan pada sektor publik, dan sebagian pula diterapkan dalam konteks keputusan manajerial dalam

pemerintahan. Berdasarkan kajian mendalam literatur Bovaird (2005), Frey (2003), Reidl (2004) dalam Huda (2009) mengidentifikasi sembilan stakeholder administrasi lokal, yaitu:

1. Masyarakat

Yaitu semua fungsi seseorang sebagai individu seperti sebagai pengguna layanan, wajib pajak, suara dalam pemilihan, dan sebagainya. Masyarakat mempengaruhi administrasi lokal melalui pemilihan dan pemungutan suara, serta interaksi sehari-hari mereka dengan administrasi dan politisi. Semakin pesatnya penggunaan internet di kalangan warga masyarakat sedikit banyak mendesak administrasi untuk mengadakan pelayanan secara on line.

2. Bisnis

Bisnis adalah dasar kesejahteraan ekonomi. Bisnis sangat mempengaruhi sistem administrasi-politik dan berada dalam hubungan yang konstan. Dalam konteks e-government, tekanan parsial dari bisnis pada administrasi meningkat dari fakta bahwa umumnya organisasi sektor privat memiliki teknologi yang lebih maju daripada sektor publik. Ditambah lagi operator sektor privat menjual barang dan jasanya kepada organisasi-organisasi sektor publik.

3. Administrasi publik lain

Administrasi tingkat nasional (federal), regional (kantonal) dan administrasi lokal lainnya dalam kesehariannya memiliki hubungan interaksi dengan administrasi lokal, sehingga dapat terhitung sebagai satu stakeholder penting.

4. Politisi

Politisi dan para pejabat, misalnya presiden atau pemimpin suatu daerah mempengaruhi kegiatan administrasi melalui keputusan dan otoritas mereka. Disamping itu pertanyaan mengenai ukuran administrasi yang optimal adalah keputusan politisi dan konsekuensi prioritas dimana politisi atau pejabat tersebut memberikan kebijakan publik. Terlebih lagi pelayan masyarakat pada umumnya dijabat oleh para politisi, kadang-kadang berada pada basis atau orientasi politiknya.

5. Parlemen dan lembaga peradilan

Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pembuat kebijakan dan aturan sebagai kerangka acuan bagi kegiatan administrasi dan interaksinya dengan pihak ketiga.

6. *Non Governmental Organization* (NGO), *International Organization* (IO), dan asosiasi

NGO, IO, Parpol dan Lembaga Asosiasi mempengaruhi sistem administrasi dan politik melalui lobi-lobi mereka. Lembaga-lembaga tersebut berpartisipasi atau memiliki andil dalam pembuatan kebijakan yang mendasari kegiatan administrasi.

7. Media

Lembaga administrasi menggunakan media sebagai sumber informasi. Selain itu, media juga berperan sebagai pembuka opini publik melalui penyiaran berita dan topik-topik informasi yang disajikan. Akhirnya, media juga mengekspos disfungsi pada sektor publik, khususnya dalam hal administrasi.

8. Pihak luar negeri

Semakin intensif hubungan sebuah negara dengan dunia luar maka kebijakan dalam negara tersebut disesuaikan dengan aturan-aturan internasional, walaupun pengaruh pihak luar negeri berbeda-beda sesuai dengan ukuran, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, negara-negara Eropa sangat mempengaruhi sistem administrasi politik di Swiss.

9. Tenaga kerja

Kekuasaan administrasi sangat ditentukan oleh karakter dan kapasitas para tenaga kerjanya serta hubungan diantara para tenaga kerja di dalamnya.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh peran *stakeholder* dan mempengaruhi *stakeholder* pula.

2.1.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan

ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas dana;
- d. pendapatan;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan; dan
- h. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2.1.4. Dimensi Kualitas Informasi

Huang, *et al.* (1999) dalam Lillrank (2003) mendefinisikan 15 dimensi kualitas informasi yang dikelompokkan menjadi empat kelas:

- 1) kualitas intrinsik: akurasi, obyektivitas, believability, dan reputasi,
- 2) kualitas aksesibilitas: akses, dan keamanan,
- 3) kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, kelengkapan dan jumlah data, dan
- 4) kualitas representasi: interpretasi, kemudahan pemahaman, representasi ringkas, dan perwakilan konsisten.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

(a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

- (b) Andal

Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

(c) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

(d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5. Sumber Daya Manusia

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut

akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

2.1.6. Sistem Pengendalian Intern

Xu, *et al.* (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik.

Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (1992) adalah:

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

- 1. Effectiveness and efficiency of operations*
- 2. Reliability of financial reporting*
- 3. Compliance with applicable laws and regulations.”*

Tujuan yang pertama adalah menekankan pada tujuan dasar dalam setiap organisasi, mencakup kinerja, profitabilitas dan pengamanan sumber daya. Kedua adalah menyangkut kehandalan laporan organisasi. Terakhir adalah berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dimana organisasi itu berada.

Sistem pengendalian intern bukan hal baru dalam pemerintahan. Petrovits *et al.* (2011) menyatakan:

Internal control is broadly defined as the process put in place by management to provide reasonable assurance regarding the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance with laws and regulations.

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan .

SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

2. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

SAS mendefinisikan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (Sawyer et al, 2005) yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Aktivitas pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan.

Terdapat hubungan langsung antara tujuan, yang merupakan hal yang diperjuangkan untuk dicapai organisasi dan komponen-komponen tersebut yang mencerminkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. .

Control environment (lingkungan pengendalian), menunjukkan atmosfir atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/ perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*.

Risk assessment (penilaian risiko), merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

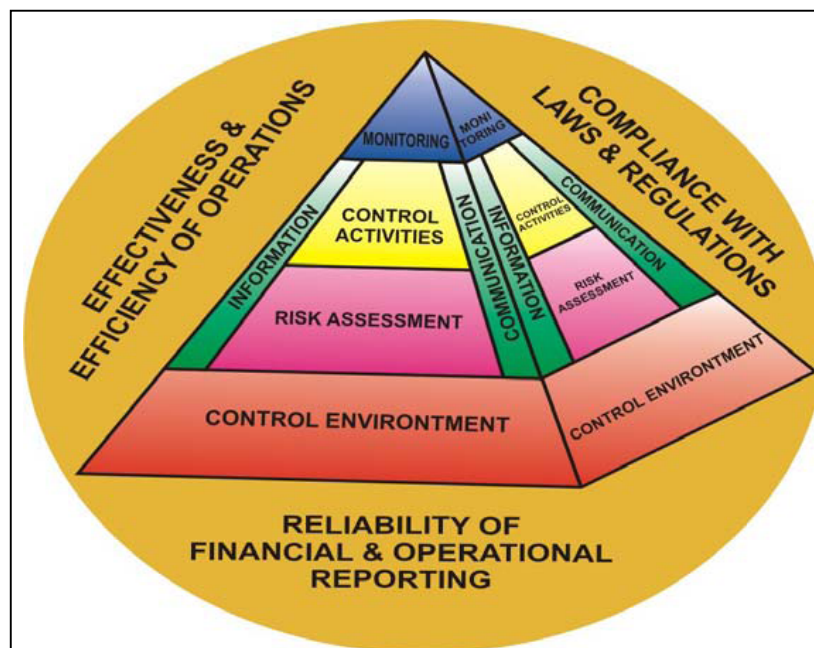
Control activities (aktivitas pengendalian), mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen secara efektif.

Information and communication (informasi dan komunikasi), sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk

memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional.

Monitoring (pemantauan), merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan. Terdapat hubungan langsung antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian intern (menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan). Bila dirangkum dalam satu kesatuan dengan definisi pengendalian intern dalam COSO (1992) digambarkan dalam bentuk **Internal Control – Integrated Framework**, sebagai berikut:

GAMBAR 2.2
INTERNAL CONTROL INTEGRATED FRAMEWORK



Sumber: COSO, 1992, diolah

Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa kelima komponen pengendalian intern merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam

rangka pencapaian tujuan, *effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial* dan *compliance with laws and regulations*.

2.1.7. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau lingkungan eksternal adalah kondisi lingkungan yang berada diluar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana *strategic* dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan kualitas laporan keuangan meningkat atau menurun.

Organisasi tidak dapat menghindar dari adanya pengaruh faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi itu sendiri, seperti kemajuan teknologi dan perubahan regulasi. Dalam kondisi ekonomi global, organisasi lebih terbuka pada organisasi lain atau negara lain. Faktor eksternal memang tidak dapat dikontrol, tetapi dapat diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Orang-orang dalam organisasi harus waspada terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta dampaknya pada organisasi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan sektor publik masih relatif sedikit, karena bidang pemerintahan masih terbilang baru dalam dunia akuntansi Indonesia, berbeda dengan pada sektor swasta. Pada sektor swasta, kualitas

laporan keuangan dapat dilihat hanya dari laporan keuangan yang bersifat kuantitatif yang biasanya tercermin dalam laba atau *earnings*, sedangkan pada sektor publik, penilaian atas kualitas laporan keuangan tidak dapat dinilai hanya dari laporan keuangan yang dihasilkan saja atau dari faktor yang bersifat kuantitatif. Dilihat dari komponen laporan keuangan antara sektor swasta dan sektor publik, komponen dalam laporan keuangan sektor publik memang lebih rumit dan kompleks, hal ini mengakibatkan perbedaan persepsi atas kualitas laporan keuangan.

Dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa penelitian terkait dengan kualitas informasi laporan keuangan sektor publik baik di dalam maupun diluar negeri. Mengingat regulasi pemerintahan di Indonesia berbeda dengan negara lain, dan standar yang menjadi acuannya pun berbeda, memungkinkan didapat perbedaan hasil analisis yang cukup signifikan

Xu, *et al.* (2003) meneliti faktor kunci dari kualitas informasi akuntansi studi kasus di Australia. Hasil penelitiannya menyatakan Sumber daya manusia, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis menentukan kualitas informasi akuntansi.

Choirunisah (2008) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi studi pada KPPN Malang. Hasil penelitiannya menyatakan Kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja.

Indriasari dan Nahartyo (2008) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Indriasari dan Nahartyo (2008) juga menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Nugraha dan Susanti (2010) meneliti Penelitian pengaruh sistem pengendalian internal terhadap reliabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) meneliti pengaruh sumber daya manusia dan informasi teknologi pemanfaatan kehandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian internal akuntansi. Hasil penelitiannya menyatakan Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu. Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatan waktu.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah diringkas dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Hongjiang Xu, Jeretta H.N., G. Daryl Nord, Binshan Lin (2003)	Key Issues of Accounting Information Quality Management: Atralian Case Study	Kualitas informasi akuntansi, sumber daya manusia, sistem, organisasi, faktor eksternal	Sumber daya manusia, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis yang menentukan kualitas informasi akuntansi
Fariziah Choirunisah (2008)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi	Kualitas informasi laporan keuangan SAI, kemampuan SDM, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, sistem pengendalian	Sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja
Desi Indriasari dan Ertambang Nahartyo (2008)	Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir)	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi	Kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi memepengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan

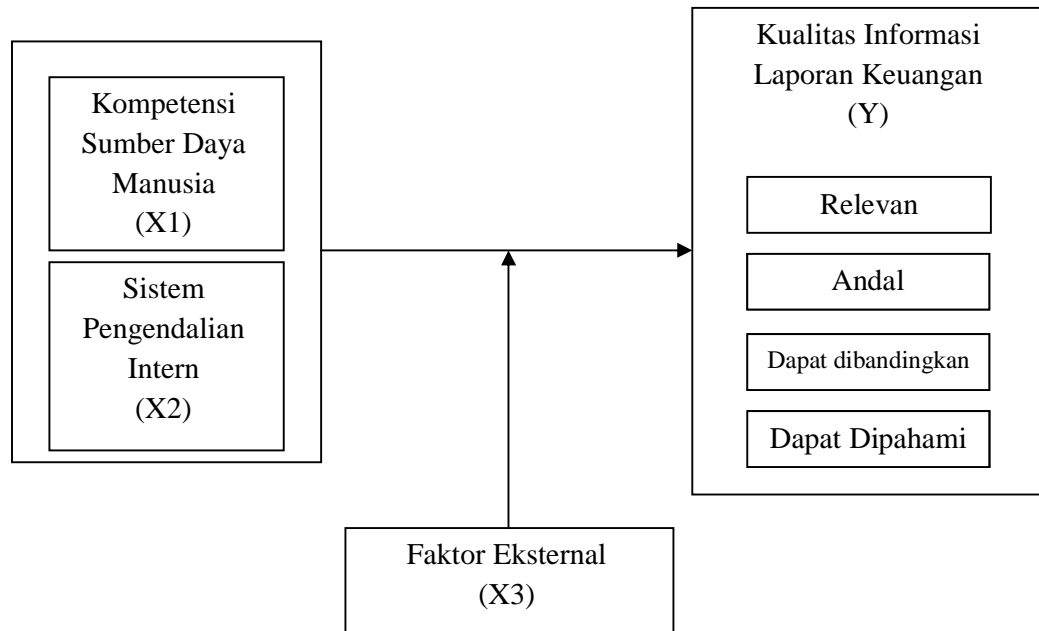
Darya setya Nugraha dan Apriyanti susanti (2010)	The Influence of Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat)	Keandalan laporan keuangan, sistem Pengendalian internal	Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan
Celviana Winidyaningrum dan Rahmawati (2010)	Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi	Keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi	Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu. Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatan waktu

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis



Berdasarkan kerangka koseptual tersebut dapat diketahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi.

2.4. Hipotesis

2.4.1. Hubungan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas infomasi laporan keuangan.

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human

capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).

Menurut Sulistyawati (2006) dalam Sutaryo (2011), SDM merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurut Guy *et al.* (2002), kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA.

Indriasari (2008) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapaistas sumberdaya manusia terhadap ketepatanwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan.

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan

2.4.2. Hubungan sistem pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011).

Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti, 2010. Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan.

H₂: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

2.4.3 Hubungan faktor eksternal sebagai variabel moderating dalam hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas informasi laporan keuangan

Dunia diluar organisasi (faktor eksternal), seperti perkembangan IT dan web, serta regulasi, mempunyai dampak yang signifikan pada operasi, sistem, dan kualitas informasi. Orang-orang dalam organisasi harus waspada terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta dampaknya pada organisasi, atau dalam kata lain, perubahan yang berasal dari luar organisasi harus diakomodasi dengan baik oleh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

Xu *et al.* (2003) membuktikan bahwa faktor eksternal merupakan faktor kritis yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi.

H₃: Faktor eksternal memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan

2.4.4 Hubungan faktor eksternal sebagai variabel moderating dalam hubungan antara sistem pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan

Dunia diluar organisasi (faktor eksternal), seperti perkembangan IT dan web, serta regulasi, mempunyai dampak yang signifikan pada operasi, sistem, dan kualitas informasi. Dinamika perubahan yang terjadi harus tetap dikontrol agar tidak mengakibatkan sebuah kerugian atau potensi kerugian daerah dan/ atau negara. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi.

H₄: Faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah secara khusus pada Kabupaten dan Kota Semarang. Faktor-faktor yang diteliti adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal.

3.1.1 Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah Kualitas Informasi laporan Keuangan. Huang, *et al.* (1999) dalam Xu, *et al.* (2003) mendefinisikan kualitas informasi adalah sesuai untuk dengan kebutuhan pengguna informasi. Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat mencapai tujuannya yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas informasi laporan keuangan daerah diukur dengan delapan indikator, yaitu: (1) manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan, (2) ketepatan pelaporan laporan keuangan, (3) kelengkapan informasi yang disajikan, (4) Penyajian secara jujur, (5) Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, (6) Keakuratan informasi yang disajikan, (7) Isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya (8) kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan, dengan menggunakan skala likert satu sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari (1)

”Sangat Tidak Setuju” hingga (5) ”Sangat Setuju” untuk skenarionya dan jika responden menjawab (5) ”Sangat Setuju” dari masing-masing variabel dan indikator, maka cenderung bahwa kualitas laporan keuangan tinggi. Kriteria tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008).

3.1.2 Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran, 2003). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal.

1. Kompetensi Sumber daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kompetensi menurut Guy *et al.* (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

Xu, *et al.* (2003) mengatakan bahwa interaksi antara sumber daya manusia dan sistem adalah isu penting dalam implementasi sitem yang akan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan instrumen yang dibuat oleh Xu, *et al.* (2003). Terdapat

empat indikator, yaitu: (1) Pemahaman terhadap peraturan dan standar, (2) Interaksi dengan sistem, (3) Kontrol terhadap SDM, (4) Pendidikan dan training, dengan menggunakan skala likert satu sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari (1) "Sangat Tidak Setuju" hingga (5) "Sangat Setuju" untuk skenarionya dan jika responden menjawab (5) "Sangat Setuju", maka cenderung bahwa kualitas laporan keuangan tinggi. Kriteria tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008).

2. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau *fraud* (Afriyanti, 2011)

Variabel sistem pengendalian intern ini dapat diukur dengan instrumen yang dibuat oleh Xu, *et al.* (2003) dan dikembangkan oleh Choirunisah (2008). Terdapat empat indikator, yaitu: (1) Integritas data, (2) Ketepatan input dan posting data, (3) Prosedur otorisasi dokumen transaksi, (4) Tersimpannya dokumen sumber data, (5) Pembagian tanggungjawab, (6) Penentuan kebijakan dan standar akuntansi, (7) Implementasi kebijakan dan standar dengan menggunakan skala likert satu sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari (1) "Sangat Tidak Setuju" hingga (5) "Sangat Setuju" untuk skenarionya dan jika responden menjawab (5) "Sangat Setuju", maka cenderung bahwa kualitas

laporan keuangan tinggi. Kriteria tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008).

3.1.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar organisasi yang tidak dapat dikendalikan. Variabel faktor eksternal ini dapat diukur dengan instrumen yang dibuat oleh Xu, *et al.* (2003). Terdapat empat indikator, yaitu: (1) kemajuan IT, (2) Perkembangan web dan teknologi internet, (3) Perubahan standar pelaporan, (4) Perubahan regulasi pemerintah secara global, dengan menggunakan skala likert satu sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari (1) "Sangat Tidak Baik" hingga (5) "Sangat Baik" untuk skenarionya dan jika responden menjawab (5) "Sangat Baik", maka cenderung bahwa memoderasi kualitas laporan keuangan.

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten dan Kota Semarang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa DPKAD/ DPPKD merupakan SKPD yang melakukan konsolidasi laporan keuangan semua SKPD dalam lingkup kabupaten dan/ atau kota dan menghasilkan output akhir berupa

laporan keuangan pemerintah kabupaten dan/atau kota. Pengambilan sampel dilakukan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang berdasarkan subjektivitas peneliti dengan alasan non random, karena keterjangkauan lokasi penelitian dan wilayah geografis yang berdekatan antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan persyaratan yang ditentukan oleh Hair *et al.* (1998). Hair *et al.* (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel yang diambil minimal 5 kali dari jumlah parameter yang dipergunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 24 parameter yang berupa item-item pertanyaan dalam kuesioner, sehingga jumlah sampel minimal yang diambil adalah sebesar $23 * 5 = 115$. Untuk mengantisipasi adanya kuesioner yang tidak kembali atau kuesioner yang tidak lengkap maka disebar kuesioner sebanyak 150. Kuesioner sebanyak 150 ini didistribusikan secara merata, yaitu sebanyak 75 untuk pemerintah kota dan 75 untuk pemerintah kabupaten.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan keterangan yang dapat memberikan gambaran atas suatu keadaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, cara memperolehnya dengan menyebarkan kuesioner kepada instansi pemerintah daerah terkait dengan pengiriman secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Jadi data bersumber pada informasi yang diberikan oleh Bagian DPKAD/ DPPKD pemerintah Kota/Kabupaten Semarang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner agar diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan data melalui metode kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan faktor eksternal, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung kepada dinas terkait yang dilakukan selama satu minggu.

3.5 Metode Analisis

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantitatifkan data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala likert 5 poin (*5-point likert scale*).

Metode analisis yang digunakan adalah *linear regression*. Ghazali (2006) menjelaskan *linear regression* adalah regresi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian dianalisis dengan berbagai uji statistik sebagai berikut:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran dan deskripsi mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Alat yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan adalah rata-rata, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Beda T-Test

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dapat dideteksi dengan cara: (1) melihat nilai mean dari kedua populasi atau sample, (2) analisis statistik. Analisis statistik dilakukan melalui tahapan:

1. Menguji apakah varians dari dua populasi bisa dianggap sama, Jika varians dua populasi secara signifikan berbeda, maka untuk membandingkan Means digunakan t test dengan asumsi varians tidak sama.
2. Menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata populasi.

Dasar pengambilan keputusan dari uji kesamaan varians dan (rata-rata populasi) adalah:

1. Jika hasil tingkat probabilitas $> 0,05$ menunjukkan variance (rata-rata populasi) sama.
2. Jika hasil tingkat probabilitas $< 0,05$ menunjukkan variance (rata-rata populasi) berbeda.

3.5.3 Uji Reliabilitas, Validitas, dan *Non Response Bias*

Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan reliabel dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

3.5.2.1 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Azwar (1997), reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot*. Pengukuran variabel tersebut dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Nunnally (1960) dalam Ghazali (2006) mengatakan pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60

3.5.2.2 Uji Validitas

Kesahihan (*validity*) suatu alat ukur adalah kemampuan alat ukur itu untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur atau dengan perkataan lain alat ukur dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu perlu

sebab pemrosesan data yang tidak sah atau bias akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar.

Untuk melihat apakah instrument tersebut valid, maka dilakukan uji validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Bila korelasi antara masing-masing butir terhadap total skor tersebut signifikan maka data tersebut dinyatakan valid.

3.5.2.3 Uji *Non Response Bias*

Pengumpulan data yang dilakukan melalui jasa pos perlu dilakukan uji non-respon bias (Ghozali, 2006). Pengujian non response bias dilakukan dengan uji independen sample t- test untuk melihat perbedaan karakteristik jawaban dari responden yang mengembalikan kuesioner sampai dengan akhir tanggal pengembalian dengan responden yang terlambat mengembalikan kuesioner. Apabila nilai Levene's for Equity Variance menunjukkan tingkat signifikan diatas 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor jawaban yang mengembalikan kuesioner tepat waktu dengan yang terlambat mengembalikan.

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta data yang dihasilkan memiliki distribusi normal. Apabila tidak dijumpai adanya multikolinearitas, dan

heteroskedastisitas, maka asumsi klasik telah terpenuhi. Uji asumsi klasik yang dilakukan menurut Ghozali (2006):

3.5.4.1 Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan: (a) melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan (b) normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Cara lain adalah dengan uji statistik *one-sample Kolmogorov-Smirnov*.

Dasar pengambilan keputusan dari *one-sample Kolmogorov-Smirnov* adalah:

1. Jika hasil *one-sample Kolmogorov-Smirnov* di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas; dan

2. Jika hasil *one-sample Kolmogorov-Smirnov* di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.4.2 Uji Multikolinearitas.

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor).

- Jika nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut
- Jika tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas.

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk

mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada/tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* dengan ketentuan:

- Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang kelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara lain untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghazali, 2006) dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda

3.5.5.1 Model Regresi

Model Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah MRA (*Moderated Regression Analysis*). MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$\text{KUAL.LK} = b_0 + b_1 \text{SDM} + b_2 \text{SPI} + b_3 \text{SDM} * \text{EKS} + b_4 \text{SPI} * \text{EKS} + e$$

Dimana:

KUAL.LK = Kualitas informasi laporan keuangan

SDM = Kompetensi Sumber daya manusia

SPI = Sistem Pengendalian Intern

EKS = Faktor Eksternal

e = Error

3.5.5.2 Koefisien determinasi

Koefisien determinan (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Range nilainya antar 0-1, apabila nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya apabila R^2 besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar.

3.5.5.3 Uji signifikansi simultan (uji statistik f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian intern (SPI) secara bersama-sama terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi () sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka hipotesis diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen, dan sebaliknya.

3.5.5.4 Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian intern (SPI) secara partial terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi () sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi $<$, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.